

Pengaruh Pemegang Saham Pengendali Terhadap Penghindaran Pajak

MASRIPAH

VERA DIYANTY*

DEBBY FITRIASARI

Universitas Indonesia

Abstract: *The objective of this research is to analyze the entrenchment effect of controlling shareholders on a tax avoidance, as well as looking at the role of family ownership, the effectiveness of board of commissioners, the effectiveness of audit committee, and external audit quality on the relationship between the entrenchment effect of controlling shareholders on tax avoidance. This research is a quantitative research using panel data and fixed effects model. Sample of this research is 280 year firm with an observation period of 2010 until 2013. The research find that the entrenchment effect of controlling shareholders has a negative effect on tax avoidance. Other test results show that when the family as the controlling shareholder, entrenchment effect of controlling shareholder do not affect on tax avoidance. Effectiveness of board of commissioners proved to weaken the relationship between entrenchment effect of controlling shareholders with tax avoidance. Little test result show that audit committee effectiveness weakens the relationship between entrenchment effect of controlling shareholders with tax avoidance. However, the role of external audit quality does not proven to weaken the relationship between the entrenchment effect of controlling shareholders with tax avoidance.*

Keywords: *entrenchment effect of controlling shareholders, the effectiveness of the board of commissioners, the effectiveness of the audit committee, the quality of the external audit, tax avoidance*

1. Pendahuluan

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham, yaitu sebagian besar perusahaan dimiliki oleh kelompok perusahaan atau pemegang saham mayoritas yang pada penelitian ini selanjutnya disebut sebagai pemegang saham pengendali (Claessens, Djankov, & Lang, 2000; Siregar, 2007; Diyanty, 2012). Kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menyebabkan konflik keagenan yang terjadi bergeser menjadi masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, bukan lagi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Penyebab terjadinya masalah keagenan tersebut dikarenakan

* Alamat korespondensi: veranabila1@gmail.com

terdapat pemisahan hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali melalui lintas kepemilikan atau struktur piramida antar perusahaan.

Menurut La Porta et al. (1999) hak kendali merupakan persentase hak suara pemegang saham untuk ikut serta dalam mengambil keputusan kebijakan perusahaan, sedangkan hak arus kas merupakan klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan sesuai persentase hak arus kas. Hak kendali pemegang saham dalam perusahaan harusnya diwakili oleh hak arus kas pemegang saham yang timbul dari investasi yang sebenarnya, tetapi karena pengaruh struktur piramida dan partisipasi dalam manajemen maka hak kendali dan hak arus kas mungkin tidak sama. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemegang saham pengendali biasanya memiliki hak kendali atas perusahaan melebihi hak arus kas mereka. Perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi¹ dengan mengatur transaksi-transaksi dalam perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, hal ini disebut efek negatif *entrenchment*² yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali.

Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa cerminan dari masalah keagenan dapat dilihat dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terkait konflik keagenan akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian terhadap penghindaran pajak ini sudah pernah ada yang meneliti. McGuire, Wang, dan Wilson (2011) menemukan bahwa manajemen yang mempunyai hak kendali melebihi hak arus kas akan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan teori "*quiet life*", yaitu *entrenchment* manajemen akan menghindari kegiatan ekspropriasi dan kegiatan legal yang meningkatkan nilai perusahaan jika kedua kegiatan tersebut dalam usahanya membutuhkan biaya yang mahal terhadap manajemen. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Badertscher, Katz, dan Rego (2013) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi akan mengurangi tindakan penghindaran pajak karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan berisiko yang bisa mengeluarkan biaya yang besar pada perusahaan dan

¹ Definisi ekspropriasi ini menurut Haryono (2008) yaitu tindakan memaksimalkan manfaat yang diterima satu pihak dengan pengorbanan pada pihak lain, dalam penelitian ini yang dimaksud pihak lain ialah pemegang saham minoritas.

² *Entrenchment* adalah kemampuan pemegang saham untuk mengendalikan keputusan manajemen dalam menentukan kebijakan dan operasi perusahaan (Fan & Wong, 2002).

manajemen. Saat kepemilikan dan pembuatan keputusan terkonsentrasi pada segelintir pihak, maka manajemen sebagai pemilik perusahaan akan menjadi lebih *risk averse* dan mengurangi tindakan yang berisiko.

Berbeda dengan penelitian McGuire et al. (2011) yang menguji penghindaran pajak pada perusahaan saham kelas ganda dan Badertscher et al. (2013) yang menguji penghindaran pajak pada perusahaan yang mayoritas milik manajemen dan *PE-backed firms*, penelitian ini menguji efek *entrenchment* pemegang saham pengendali pada perusahaan publik di Indonesia (khususnya perusahaan manufaktur) yang dihubungkan dengan tindakan penghindaran pajak. Menurut La Porta et al. (1999), pemegang saham pengendali yang memiliki hak kendali melebihi hak arus kas dapat terlibat dalam manajemen untuk memutuskan kebijakan dan operasi perusahaan. Dengan demikian pemegang saham pengendali dapat melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi perusahaan, termasuk tindakan penghindaran pajak dan mentransfer manfaat pajak ke perusahaan lain milik pemegang saham pengendali tanpa harus membaginya dengan pemegang saham non pengendali di perusahaan awalnya.

Struktur kepemilikan pada perusahaan publik di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh keluarga sebagai pemegang saham pengendali utama (Siregar, 2007; Diyanty, 2012). Penelitian Sari (2010) memberikan gambaran awal mengenai perusahaan di Indonesia bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih cenderung melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena mungkin keuntungan berupa penghematan pajak bagi perusahaan di Indonesia lebih besar daripada kemungkinan terkena denda dari petugas pajak dan kemungkinan rugi karena turunnya harga saham perusahaan atas rusaknya nama perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali ini kemungkinan dapat meningkat seandainya pemegang saham pengendali tersebut ialah individu atau keluarga. Adanya dominasi pemegang saham pengendali keluarga inilah yang akan memicu tingginya konflik keagenan antara pemegang saham pengendali keluarga dengan pemegang saham nonpengendali terkait perencanaan pajak.

Penelitian Friese, Link, dan Mayer (2006) menyatakan bahwa perencanaan pajak yang terjadi dalam suatu perusahaan tergantung pada dinamika tata kelola di perusahaan tersebut. *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan tata kelola perusahaan yaitu sebagai

proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Aspek penilaian yang cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi tata kelola perusahaan diantaranya ialah komitmen penuh dari peran dewan komisaris, keberadaan komite audit yang efektif, dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan kepada publik (Effendi, 2009).

Berdasarkan telaah literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang menguji secara komprehensif pengaruh efek *entrenchment* pemegang saham pengendali, peran kepemilikan keluarga dan efektifitas mekanisme tata kelola perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan di Indonesia untuk melihat pengaruh pemisahan hak arus kas dan hak kendali yang dapat menyebabkan terjadinya ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak, dan meneliti peran kepemilikan keluarga dan mekanisme tata kelola perusahaan yang diukur melalui efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan kualitas audit eksternal.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Teori Keagenan

Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah perusahaan cenderung menimbulkan masalah keagenan diantara keduanya (Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham sebagai pemberi modal ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas hasil investasinya, sedangkan manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan diasumsikan ingin mendapatkan kompensasi keuangan yang tinggi dari perusahaan. Keinginan memaksimalkan kesejahteraan masing-masing inilah yang terkadang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham sehingga terjadinya masalah keagenan.

Teori keagenan muncul untuk mengatasi masalah keagenan. Menurut Haryono (2005) masalah keagenan merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan yang dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Kepemilikan orang dalam (*insiders ownerships*) dan kepemilikan orang luar (*outsiders*

ownerships) mempunyai potensi menimbulkan masalah keagenan, namun mempunyai peranan penting dalam mengurangi masalah keagenan juga. Potensi yang dapat ditimbulkan yaitu terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas sebagai pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham nonpengendali (Shleifer & Vishny, 1997). Pemegang saham pengendali dapat mempengaruhi kebijakan operasi perusahaan melalui manajemen yang mereka pilih, dan seringkali keputusan akan kebijakan perusahaan itu lebih berdasarkan pada kepentingan pemegang saham pengendali tetapi dapat merugikan pemegang saham yang nonpengendali. Dengan demikian, masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali ini dapat mengurangi masalah keagenan antara manajemen dengan pemegang saham.

2.2. *Efek Entrenchment Pemegang Saham Pengendali*

Perusahaan mempunyai dua pilihan untuk memperlakukan hak arus kas yang dimilikinya, yaitu membayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham atau mereinvestasi pada proyek-proyek (Siregar, 2009). Dengan memanfaatkan hak kendali yang efektif dari suatu perusahaan, hal ini memungkinkan pemegang saham pengendali untuk menentukan bagaimana keuntungan dibagi di antara pemegang saham. Meskipun pemegang saham minoritas berhak atas hak arus kas sesuai dengan investasi saham mereka, akan tetapi dengan menggunakan hak kendali pemegang saham pengendali dapat menjauhkan pemegang saham minoritas dari hak-hak mereka.

Peningkatan hak kendali pemegang saham pengendali yang besar mendorong pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat melalui ekspropriasi tanpa mempedulikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Pada akhirnya, pemegang saham nonpengendali yang merasa dirugikan atas keputusan kebijakan perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan laba perusahaan yang seharusnya dapat dinikmati oleh pemegang saham minoritas telah ditransfer ke perusahaan lain milik pemegang saham pengendali. Hal ini ialah tindakan ekspropriasi yang diimplikasikan dari efek *entrenchment* pemegang saham pengendali. Efek *entrenchment* adalah akibat dari tindakan yang dilakukan pemegang saham pengendali dilindungi oleh hak kendali, sehingga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan (Sanjaya, 2010).

2.3. Penghindaran Pajak

Hutagaol (2007) mengkategorikan perbedaan rekayasa keuangan sebagai *tax evasion* atau *tax avoidance*, yaitu apakah rekayasa keuangan yang dibuat oleh Wajib Pajak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau tidak. Apabila bertentangan dengan ketentuan perpajakan, maka tindakan penghematan pajak tersebut dikelompokkan sebagai *tax evasion*. Bila tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku maka tindakan tersebut masuk dalam kategori *tax avoidance* (penghindaran pajak). Namun, dalam praktiknya tidak sesederhana ketika mengklasifikasikannya, karena perbedaan antara penghindaran pajak dengan *tax evasion* sangat tipis. Sehingga bisa saja terjadi bahwa semula rekayasa keuangan dimaksudkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak tetapi secara tidak sadar ia telah melakukan *tax evasion*.

Menurut Leon dan Meliala (2009) esensi penghindaran pajak ialah semua perbuatan meminimalisasi utang pajak sah untuk dilakukan, selama tidak diatur dengan rinci dalam perundang-undangan perpajakan. Definisi yang serupa oleh Devano dan Rahayu (2006) bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan legal yang dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Efek Entrenchment Pemegang Saham Pengendali terhadap Penghindaran Pajak

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian telah menciptakan masalah keagenan. McGuire, Wang, dan Wilson (2011) melakukan penelitian pada perusahaan saham kelas ganda yang hasilnya menunjukkan bahwa besarnya perbedaan antara hak kendali dengan hak arus kas manajemen berhubungan negatif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan, meskipun terdapat manfaat dari peningkatan penghindaran pajak yaitu penghematan pajak lebih besar yang berpotensi mengurangi beban pajak pada laporan keuangan dan meningkatkan arus kas perusahaan. Hal ini dikarenakan manajemen mempunyai hak kendali yang tinggi namun hak arus kas yang terbatas maka manfaat pajak yang didapat juga terbatas sesuai hak arus kas, sehingga insentif untuk terlibat dalam tindakan penghindaran pajak rendah.

Hasil penelitian McGuire et al. (2011) sesuai dengan teori “*quiet life*” yang menyatakan bahwa ketika manajemen telah menjadi “*entrenched*” maka mereka akan menghindari usaha yang mengeluarkan biaya besar yang dalam hal ini dikaitkan dalam kegiatan perencanaan pajak. Selain itu, *entrenchment* manajemen dapat bertindak sesuka hati tanpa ada rasa takut diberhentikan dari jabatannya dan tidak ada tekanan dari para investor untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga manajemen akan kurang terlibat dalam tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian Badertscher et al. (2013) konsisten dengan hasil penelitian McGuire et al. (2011). Badertscher et al. (2013) menemukan bahwa manajemen pada perusahaan yang kepemilikan dan pengendalian terkonsentrasi tinggi lebih cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dibandingkan manajemen pada perusahaan yang kepemilikan dan pengendalian kurang terkonsentrasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Fama dan Jensen (1983) dalam Badertscher et al. (2013) yaitu ketika kepemilikan ekuitas dan pembuat keputusan perusahaan terkonsentrasi hanya pada sejumlah kecil pembuat keputusan, kepemilikan manajemen akan lebih menjadi *risk averse* sehingga akan mengurangi investasi pada proyek berisiko.

Salah satu kegiatan berisiko yang bisa membebankan biaya yang cukup besar kepada perusahaan dan manajemennya ialah penghindaran pajak, misalnya biaya yang dibayarkan kepada ahli pajak, waktu yang dihabiskan untuk resolusi audit pajak, denda reputasi, dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Hal ini menyebabkan kepemilikan manajemen *risk averse* lebih memilih untuk perencanaan pajak yang kurang berisiko. Oleh karena itu, kegiatan perencanaan pajak yang mahal tersebut akan menjadi pertimbangan manajemen maupun kepemilikan saham pengendali.

Semakin besar hak kendali pemegang saham pengendali akan meningkatkan efek *entrenchment* yang mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi semakin parah, karena menurut La Porta et al. (1999) melalui struktur piramida atau lintas kepemilikan dengan hak kendali yang tinggi, pemegang saham pengendali memperoleh kekuatan yang tidak proporsional terhadap hak arus kas mereka. Dalam kondisi tersebut, pemegang saham pengendali bisa mempengaruhi manajemen dalam keputusan untuk melakukan penghindaran pajak, bahkan pemegang saham pengendali dapat menikmati manfaat pajak tersebut sendiri. Misalnya, perusahaan melakukan *transfer*

pricing ke perusahaan baru yang didirikan oleh pemegang saham pengendali di daerah yang bebas pajak sebagai alat untuk menyembunyikan laba perusahaan dan sebagai upaya dari tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian, pemegang saham pengendali dapat menikmati keuntungan sendiri melalui anak perusahaan yang dimilikinya, sedangkan biaya penghindaran pajak akan ditanggung perusahaan dan para pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali tetapi hanya sebatas hak arus kas yang dimilikinya. Menurut Lo, Wong, dan Firth (2010) tarif pajak penghasilan perusahaan merupakan faktor untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Oleh karena itu, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1. *Efek entrenchment pemegang saham pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak*

2.4.2. Peran Kepemilikan Keluarga dalam Hubungan Pemegang Saham Pengendali dan Penghindaran Pajak

Perusahaan publik di Indonesia sebagian besar dikendalikan oleh pemegang saham tunggal yang diantara perusahaan tersebut ialah keluarga dan perusahaan kecil (Claessens et al., 2000; Siregar, 2007; Diyanty, 2012). Secara relatif, perusahaan keluarga dengan kepemilikan tinggi lebih mungkin untuk berperilaku seperti individu (Hanlon & Heitzman, 2010). Perilaku tersebut disebabkan karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik keagenan terkait kepentingan pribadi pemegang saham pengendali dan mengorbankan hak pemegang saham minoritas.

Menurut Desai dan Dharmapala (2006) kepemilikan keluarga bersedia untuk melupakan manfaat penghematan pajak dan mengabaikan penghindaran pajak daripada terkena potensi denda dan reputasi perusahaan yang jelek dari pemeriksaan IRS audit. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen, Chen, Cheng dan Shevlin (2010) untuk periode tahun 1996 sampai tahun 2000 yang menunjukkan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresivan pajak (bentuk ekstrim dari penghindaran pajak) yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Namun, semua penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan hasil penelitian Sari (2010) yang dilakukan di Indonesia. Penelitian Sari (2010) memberikan gambaran awal bahwa perusahaan keluarga di Indonesia cenderung memiliki

tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-keluarga. Kemungkinan terjadinya fenomena ini dikarenakan manfaat yang akan diterima oleh pemegang saham pengendali lebih besar jumlahnya dibandingkan rugi yang akan diterima akibat dari kemungkinan terkena denda pajak dan turunnya harga saham atas turunnya reputasi perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2. *Kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham pengendali memperkuat efek entrenchment pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak*

2.4.3. Peran Efektifitas Dewan Komisaris dalam Hubungan antara Pemegang Saham Pengendali dengan Penghindaran Pajak

Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal dari konsep tata kelola perusahaan pada dasarnya ditekankan untuk dapat mengurangi konflik keagenan, sehingga dapat membatasi dan melakukan kontrol yang efektif pada tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pemilik saham mayoritas dalam melakukan ekspropriasi. Adanya efektifitas dewan komisaris diharapkan dapat mengendalikan aktivitas yang dilakukan manajemen dalam tindakan penghindaran pajak. Selain itu, dewan komisaris yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dapat memberikan perlindungan dan menjamin tingkat perlakuan yang adil untuk semua pemegang saham.

Lanis dan Richardson (2011) menunjukkan bahwa proporsi anggota dari luar (independen) yang lebih tinggi pada *board* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak perusahaan melalui perbaikan tata kelola perusahaan. Dewan harus mengawasi manajemen untuk memastikan bahwa manajemen dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan semua pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dewan komisaris dapat meningkatkan perlindungan pada pemegang saham minoritas dikarenakan efektifitas dewan komisaris akan mampu mengawasi, membatasi dan melakukan pengendalian yang efektif pada tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pemilik mayoritas dalam melakukan tindakan ekspropriasi yang berhubungan dengan penghindaran pajak. Dengan demikian, dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3. *Efektifitas dewan komisaris memperlemah pengaruh efek *entrenchment* pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak*

2.4.4. Peran Efektifitas Komite Audit dalam Hubungan antara Pemegang Saham Pengendali dengan Penghindaran Pajak

Penelitian Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) menguji independensi komite audit internal dengan agresivitas pajak perusahaan yang menunjukkan bahwa independensi komite audit internal memiliki peran penting dalam meminimalkan kemungkinan agresivitas pajak dalam perusahaan. Komite audit independen dianggap mampu meningkatkan reputasi perusahaan melalui pengawasan yang lebih efektif pada manajemen, potensi kerusakan reputasi bisa dalam hal salah saji keuangan (atau pajak) dalam laporan tahunan perusahaan. Dengan demikian, komite audit diharapkan untuk menilai kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan akuntansi dan informasi yang berhubungan dengan pajak yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. *Efektifitas komite audit memperlemah pengaruh efek *entrenchment* pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak*

2.4.5. Peran Kualitas Audit Eksternal dalam Hubungan antara Pemegang

Francis (2004) mereviu penelitian tentang kualitas audit pada perusahaan publik yang terdaftar karena terdapat pemisahan antara pemilik dan manajemen, sehingga terdapat kebutuhan auditor eksternal yang independen terutama dalam menjalankan konsep tata kelola perusahaan yang baik dan fungsi pengawasan. Baker dan Owsen (2002) juga berpendapat bahwa audit memiliki peranan untuk meningkatkan kendali di perusahaan yang akan bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan dan publik secara umum, hal ini dikarenakan auditor eksternal mempertimbangkan tata kelola perusahaan ketika melakukan perencanaan audit. Di sisi lain, penelitian terkait hubungan antara agresivitas pajak (bentuk ekstrim dari penghindaran pajak) dan kualitas audit eksternal sudah ada yang meneliti sebelumnya, yaitu penelitian Richardson et al. (2013) yang menyatakan bahwa KAP Big 4 dapat membantu dalam mengurangi tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan (klien) melalui peningkatan

monitoring dan audit mutu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5. *Kualitas audit eksternal memperlemah pengaruh efek entrenchment pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak*

3. Metode Penelitian

3.1. Sumber Data dan Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang didapat dari Eikon Thomson Reuters di Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PDEB-FEUI), situs resmi BEI ataupun di situs resmi perusahaan tersebut. Data struktur kepemilikan perusahaan manufaktur diperoleh dengan penelusuran kepemilikan akhir perusahaan dari Pusat Data Bisnis Indonesia dan Departemen Hukum dan Kehakiman RI.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan yaitu: (i) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berdasarkan IDX Statistics dari tahun 2010 hingga 2013; (ii) memiliki nilai ETR dan CETR kurang dari satu; (iii) bukan kepemilikan ASTINDO³; (iv) memiliki nilai buku ekuitas positif; (v) terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2013.

3.2. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua model persamaan untuk menguji lima hipotesis penelitian. Model persamaan pertama digunakan untuk menguji besarnya efek *entrenchment* pemegang saham pengendali dalam menurunkan tindakan penghindaran pajak, sebagaimana hipotesis 1. Sedangkan model persamaan kedua dibuat untuk menguji peran kepemilikan keluarga, efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan kualitas audit eksternal dalam hubungan efek *entrenchment* pemegang saham pengendali dengan penghindaran pajak, sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis 2, 3, 4, dan 5.

³ perusahaan yang kepemilikan saham pengendalinya tidak terkategori asing tapi Indonesia yang oleh Kim (2003) dalam Diyanty (2012) kemudian dinamakan ASTINDO.

Berikut ini kedua model persamaan tersebut yaitu:

Model 1

$$\text{TaxAvd}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{WEDGE}_{it} + \beta_2 \text{ROA}_{it} + \beta_3 \text{LEV}_{it} + \beta_4 \text{PPE}_{it} + \beta_5 \text{MB}_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Model 2

$$\begin{aligned} \text{TaxAvd}_{it} = & \alpha + \beta_1 \text{WEDGE}_{it} + \beta_2 \text{FAMILY}_{it} + \beta_3 \text{EDK}_{it} + \beta_4 \text{EKA}_{it} + \beta_5 \text{KAE}_{it} + \\ & \beta_6 \text{WEDGE}_{it} * \text{FAMILY}_{it} + \beta_7 \text{WEDGE}_{it} * \text{EDK}_{it} + \beta_8 \text{WEDGE}_{it} * \text{EKA}_{it} + \beta_9 \text{WEDGE}_{it} * \text{KAE}_{it} + \beta_{10} \text{ROA}_{it} \\ & + \beta_{11} \text{LEV}_{it} + \beta_{12} \text{PPE}_{it} + \beta_{13} \text{MB}_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

TaxAvd_{it} ialah penghindaran pajak yang diukur dengan ETR dan CETR; WEDGE merupakan perbedaan antara hak kendali dan hak arus kas; FAMILY_{it} merupakan *dummy* kepemilikan keluarga, 1 untuk perusahaan i pada tahun t yang termasuk kepemilikan keluarga dan 0 untuk perusahaan i pada tahun t yang bukan; EDK ialah efektifitas dewan komisaris; EKA merupakan efektifitas komite audit; KAE merupakan kualitas audit eksternal; WEDGE *FAMILY merupakan variabel interaksi WEDGE dan FAMILY; WEDGE *EDK merupakan variabel interaksi WEDGE dan EDK; WEDGE *EKA merupakan variabel interaksi WEDGE dan EKA; WEDGE *KAE ialah variabel interaksi WEDGE dan KAE; LEV_{it} ialah *Leverage* untuk perusahaan i, tahun t; PPE_{it} ialah *property, plant, dan equipment* perusahaan i pada tahun t; MB_{it} ialah *market-to-book ratio* untuk perusahaan i, pada awal tahun t.

3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pengukuran penghindaran pajak seperti dalam penelitian McGuire et al. (2011). Terdapat dua proksi yang digunakan pada penelitian McGuire et al. (2011) untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu *effective tax rates* dan *cash effective tax rates*. Namun, penelitian ini hanya menggunakan pengukuran yaitu *effective tax rates*. Hal ini dikarenakan adanya bias dalam menghitung *cash effective tax rates*, yaitu nilai pajak yang disajikan dalam *cash flow* di laporan keuangan perusahaan sampel tidak sepenuhnya merupakan pajak penghasilan badan tetapi terdapat unsur pajak lainnya seperti pajak bea cukai atau pajak lainnya. Namun, sebagai pengganti pengukuran *cash effective tax rates* dan dengan

maksud untuk memperkuat model dalam memprediksi temuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pengukuran *current effective tax rates*.

Penelitian ini akan menggunakan nilai ETR dan CETR yang berada dalam rentang 0 – 1 seperti yang dilakukan Chen et al. (2010) dan Sari (2010). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki nilai ETR dan CETR lebih dari satu akan dikeluarkan dari sampel, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai ETR dan CETR negatif akan diubah menjadi nilai nol sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2014) untuk menghindari masalah dalam pengolahan estimasi model. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan nilai ETR dan CETR negatif dan lebih dari satu akan menjadi data *outlier* yang tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan normal.

3.3.2. Variabel Independen

Wedge digunakan untuk mengukur proksi variabel independen dalam penelitian ini, yaitu efek *entrenchment* pemegang saham pengendali berupa insentif ekspropriasi terhadap pemegang saham nonpengendali. Nilai *wedge* dapat dihitung dari pemisahan hak kendali dan hak arus kas pemegang saham melalui struktur kepemilikan piramida atau lintas kepemilikan.

3.3.3. Variabel Moderasi

3.3.3.1. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga pada penelitian ini mengikuti definisi yang digunakan dalam penelitian Diyanty (2012) bahwa kepemilikan keluarga ialah pemegang saham pengendali akhir dalam suatu rantai kepemilikan dengan nama individu dalam satu keluarga atau nama grup keluarga. Kepemilikan keluarga akan diukur menggunakan *dummy* kepemilikan saham pengendali akhir yang terbesar. Jika kepemilikan saham pengendali akhir yang terbesar oleh nama individu dalam satu keluarga ataupun grup keluarga, maka akan diberi nilai 1 dan nilai 0 jika lainnya.

3.3.3.2. Efektifitas Dewan Komisaris dan Efektifitas Komite Audit

Pengukuran efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit pada penelitian ini akan merujuk penelitian Hermawan (2009) dengan melihat karakteristik (independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi) yang dimiliki dewan komisaris dan komite audit. Ada 17 pertanyaan untuk skor efektifitas fungsi pengawasan dewan komisaris dan 11 pertanyaan untuk skor efektifitas fungsi pengawasan komite audit dengan penilaian terdiri dari 2 kemungkinan jawaban (*good* dan *poor*) dan 3

kemungkinan jawaban (*good*, *fair*, dan *poor*). Jawaban *good* diberi nilai 3, *fair* diberi nilai 2, dan *poor* diberi nilai 1. Pada pertanyaan yang tidak dapat diperoleh informasinya dari laporan tahunan perusahaan, maka akan diberi nilai jawaban *poor* (nilai 1). Pada penelitian ini, skor efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit diukur menggunakan variabel *dummy* dengan melihat total nilai dari seluruh pertanyaan. Batasan skor ini sesuai dengan penelitian Hermawan (2009).

3.3.3.3. *Kualitas Audit Eksternal*

Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 dapat memiliki pengaruh besar pada tingkat tindakan penghindaran pajak di perusahaan. Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 seharusnya mengurangi tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 4. Pada penelitian ini, kualitas audit diproksikan dengan ukuran kantor akuntan publik, diberi nilai 1 jika laporan tahunan perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan diberi nilai 0 jika laporan tahunan perusahaan diaudit selain KAP Big 4.

3.3.4. *Variabel Kontrol*

Dalam model penelitian juga dimasukkan beberapa variabel kontrol, yaitu: *Return on Asset* (ROA), *LEVERAGE*, *property, plant, dan equipment* (PPE), dan *market-to-book ratio* (MB).

3.4. *Metode Analisis*

Pengujian hipotesis penelitian ini akan dilakukan dengan metode analisis regresi dengan menggunakan model data *balanced panel*.

4. Hasil Penelitian

4.1. *Statistik Deskriptif*

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan laporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Total sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 70 perusahaan yang terdiri dari 280 *firm year* (lihat Tabel 1 pada Lampiran). Penelitian ini menggunakan dua proksi dalam mengukur tingkat tindakan penghindaran pajak, yaitu ETR (*effective tax rate*) dan CETR (*current effective tax rate*). Berdasarkan Tabel 2 pada Lampiran terlihat nilai rata-

rata ETR yaitu 25% dan nilai rata-rata CETR yaitu 22%. Artinya, rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki nilai *effective tax rate* yang tidak jauh berbeda dengan *statutory tax rate*.

Nilai maksimal dan minimum *wedge* (WEDGE) pada perusahaan sampel sebesar 0,40 dan 0. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar selisih hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pada perusahaan sampel. Persentase hak kendali dan hak arus kas ini dapat ditelusuri melalui rantai kepemilikan pemegang saham, sehingga dapat diketahui siapa pemegang saham pengendali dan dapat dikategorikan sebagai perusahaan keluarga atau perusahaan non-keluarga. Selama masa pengamatan ditemukan sebanyak 128 perusahaan atau 46% dari perusahaan sampel merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga, dan sisanya 152 perusahaan atau 54% dari total sampel perusahaan dikendalikan oleh non-keluarga (lihat Tabel 2 pada Lampiran).

Rata-rata nilai efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit pada perusahaan sampel sebesar sebesar 68% dan 71% (lihat Tabel 2 pada Lampiran). Secara keseluruhan fungsi dewan komisaris dan komite audit pada perusahaan sampel menunjukkan cukup efektif sebagai pengendalian internal dalam mekanisme tata kelola perusahaan. Sedangkan rata-rata (*mean*) kualitas audit eksternal pada perusahaan sampel sebesar 44% dan median 0 (lihat Tabel 2 pada Lampiran). Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar rata-rata perusahaan sampel diaudit oleh KAP Non Big 4.

4.2. Hasil Uji Hipotesis

4.2.1. Pengaruh Efek Entrenchment terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji membuktikan bahwa besarnya selisih antara hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali berhubungan positif signifikan dengan nilai ETR dan CETR yang tinggi (lihat Tabel 3 pada lampiran). Artinya efek *entrenchment* pemegang saham pengendali berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini tidak terbukti. Namun, penelitian ini ternyata mendukung hasil penelitian McGuire et al. (2011) yang menunjukkan bahwa selisih antara hak kendali dan hak arus kas mempengaruhi nilai *tax effective rates* yang lebih tinggi, yaitu manajemen yang memiliki hak kendali lebih digunakan untuk mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Sesuai dengan teori “*quiet life*” yang dinyatakan oleh McGuire et al. (2011), pada penelitian ini menduga *entrenchment* pemegang saham pengendali dapat berpartisipasi dalam manajemen untuk menghindari usaha yang mengeluarkan biaya besar meskipun

penghindaran pajak merupakan kegiatan legal. Hal ini dikarenakan pemegang saham pengendali yang memiliki hak arus kas terbatas dan adanya biaya yang harus dikeluarkan manajemen dan perusahaan dalam perencanaan pajak seperti penghindaran pajak. Sesuai dengan penelitian Badertcher et al. (2013) bahwa hubungan negatif tersebut juga bisa disebabkan karena kepemilikan dan pembuat keputusan perusahaan terkonsentrasi hanya pada segelintir pihak tertentu (pemegang saham pengendali) dalam membuat keputusan, sehingga pemegang saham pengendali akan lebih menjadi *risk averse* dan dapat mempengaruhi manajemen untuk mengurangi investasi pada proyek berisiko termasuk mengurangi penghindaran pajak.

Berdasarkan statistika deskriptif, terlihat nilai *wedge* pemegang saham pengendali untuk perusahaan sampel relatif kecil. Kemungkinan tidak diterima secara empiris untuk hipotesis pertama pada penelitian ini dikarenakan selisih antara hak kendali dengan hak arus kas pemegang saham pengendali yang rendah pada perusahaan sampel, sehingga pemegang saham pengendali tidak tertarik melakukan tindakan penghindaran pajak mengingat hak arus kas yang terbatas dan adanya biaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

4.2.2. Peran Kepemilikan Keluarga dalam Hubungan Efek *Entrenchment* dengan Penghindaran Pajak

Hipotesis 2 (H_2) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham pengendali memperkuat efek *entrenchment* pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang positif tetapi tidak bernilai signifikan (lihat Tabel 4 pada lampiran). Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini tidak terbukti (ditolak). Arah yang negatif untuk hubungan kepemilikan keluarga dengan tindakan penghindaran pajak ternyata tidak selaras saat kepemilikan keluarga diinteraksikan pada efek *entrenchment* pemegang saham pengendali lalu dihubungkan dengan penghindaran pajak perusahaan.

Berkurangnya keagresifan keluarga sebagai pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak kemungkinan dikarenakan nilai *wedge* yang rendah pada sampel. Selain itu, diduga fenomena ini terjadi dikarenakan kemungkinan manfaat privat yang diterima pemegang saham pengendali lebih besar dengan melakukan *tunneling* keuntungan ke perusahaan induk dibandingkan dengan melakukan penghematan pajak. Penelitian Lo et al. (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan

pemerintah di Cina berpengaruh dalam keputusan *transfer pricing*, yaitu perusahaan bersedia mengabaikan penghematan pajak untuk melakukan *tunneling* keuntungan kepada perusahaan induk. Meskipun pada penelitian Lo et al. (2010) belum ada bukti yang mendominasi dari salah satu insentif yang didapat pemegang saham pengendali dalam mempertimbangkan antara penghematan pajak atau *tunneling* saat membuat keputusan *transfer pricing* dalam suatu perusahaan.

4.2.3. Peran Efektifitas Dewan Komisaris dalam Hubungan Efek Entrenchment dengan Penghindaran Pajak

Hipotesis 3 (H_3) menyatakan bahwa efektifitas dewan komisaris memperlemah pengaruh efek *entrenchment* pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan arah hubungan yang positif dan signifikan (lihat Tabel 4 pada lampiran). Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian ini dapat diterima (terbukti). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya dewan komisaris dapat mengurangi konflik keagenan dengan membatasi dan melakukan pengawasan yang efektif pada manajemen atau pemilik saham mayoritas yang dapat melakukan tindakan sesuai kepentingan sendiri.

4.2.4. Peran Efektifitas Komite Audit dalam Hubungan Efek Entrenchment dengan Penghindaran Pajak

Hipotesis 4 (H_4) menyatakan bahwa efektifitas komite audit memperlemah pengaruh efek *entrenchment* pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil uji regresi dimana variabel penghindaran pajak yang diukur dengan ETR menunjukkan arah hubungan yang positif dan signifikan, sedangkan hasil uji regresi dimana variabel penghindaran pajak yang diukur dengan CETR menunjukkan arah hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan (lihat Tabel 4 pada lampiran). Secara marjinal, hasil penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa efektifitas komite audit memperlemah hubungan efek negatif *entrenchment* pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Fungsi komite audit yang semakin efektif akan mencegah pemegang saham pengendali melakukan penghematan pajak dan meningkatkan nilai *effective tax rates* perusahaan.

Ketidaksignifikanan efektifitas komite audit dalam hubungan efek *entrenchment* pemegang saham pengendali terhadap nilai CETR perusahaan diduga karena perbedaan substansi pada nilai ETR

dan CETR perusahaan. Nilai ETR memiliki esensi perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap antara kebijakan dalam perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Sedangkan nilai CETR memiliki esensi perencanaan pajak sekaligus perencanaan arus kas oleh manajemen. Kebijakan manajemen sangat berpengaruh terhadap arus kas perusahaan terkait keputusan mengalokasikan dana untuk operasi perusahaan atau diinvestasikan. Sedangkan tugas komite audit terkait penelaahan informasi keuangan yang menyebabkan komite audit cenderung lebih fokus ke manajemen pajak, bukan manajemen arus kas. Oleh karena itu, komite audit lebih mempengaruhi ETR perusahaan.

4.2.5. *Peran Kualitas Audit Eksternal dalam Hubungan Efek Entrenchment dengan Penghindaran Pajak*

Hipotesis 5 (H_5) menyatakan bahwa kualitas audit eksternal memperlemah pengaruh efek *entrenchment* pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil uji regresi pada penelitian ini dimana variabel penghindaran pajak yang diukur dengan ETR menunjukkan arah hubungan yang negatif dan signifikan, sedangkan hasil uji regresi dimana variabel penghindaran pajak yang diukur dengan CETR menunjukkan arah hubungan yang negatif juga tetapi tidak signifikan (lihat Tabel 4 pada lampiran). Perbedaan ketidaksignifikanan ini kemungkinan dikarenakan konsentrasi auditor ialah seberapa besar jumlah pajak yang dibebankan oleh perusahaan yang direfleksikan oleh nilai ETR perusahaan. Sedangkan nilai CETR perusahaan lebih ke ranah konsentrasi manajemen dalam menentukan seberapa besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian ini awalnya menduga bahwa tingkat kualitas audit eksternal memperlemah efek negatif *entrenchment* pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Namun hasil uji regresi ini menunjukkan hasil yang berbeda arah dengan prediksi awal. Diduga fenomena ini terjadi dikarenakan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 mencerminkan kualitas audit yang menambah nilai perusahaan, dan dapat meyakini pemegang saham nonpengendali bahwa kepentingan mereka terlindungi. Disisi lain, tindakan penghindaran pajak merupakan penghematan pajak yang legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang yang menurut Devano dan Rahayu (2006) dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran

hukum yang dilakukan. Dengan demikian, pemegang saham pengendali dapat melakukan penghindaran pajak dan tetap dapat menikmati sendiri manfaat pajak tanpa membaginya dengan pemegang saham non-pengendali dan hal ini dapat ditutupi dengan adanya kualitas audit eksternal oleh KAP Big 4.

4.2.6. Analisis Variabel Kontrol

Hasil regresi pada penelitian ini menunjukkan variabel ROA berpengaruh positif signifikan pada nilai CETR perusahaan. Variabel LEV menunjukkan hubungan yang berlawanan dengan prediksi awal. Pada prediksi awal diperkirakan variabel LEV berhubungan negatif dengan *effective tax rates* (ETR dan CETR), tetapi hasil regresi ini ternyata menunjukkan hubungan positif yang sesuai dengan penelitian Sari (2010). Dalam penelitian Sari (2010) dijelaskan kemungkinan hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ,4/1995. Sedangkan untuk ukuran variabel PPE dan MB memiliki hubungan negatif signifikan terhadap nilai ETR dan CETR perusahaan. Hasil uji ini telah sesuai dengan prediksi awal, yaitu PPE dan MB berhubungan positif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Konsisten dengan pernyataan Khuruna dan Moser (2009) bahwa pertumbuhan yang tinggi pada umumnya memiliki nilai *effective tax rates* yang rendah.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa efek *entrenchment* pemegang saham pengendali berpengaruh positif terhadap nilai ETR dan CETR perusahaan, yang artinya menurunkan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak memberikan bukti empiris mengenai pengaruh saat kepemilikan keluarga menjadi pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak. Kemungkinan hasil tersebut dikarenakan nilai *wedge* yang kecil tidak memotivasi pemegang saham pengendali keluarga untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa efektifitas dewan komisaris memperlemah hubungan antara efek *entrenchment* pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak

perusahaan. Dewan komisaris yang melaksanakan tugasnya dengan efektif akan mendorong pemegang saham pengendali untuk meningkatkan nilai ETR dan CETR perusahaan. Namun, komite audit yang melaksanakan tugasnya dengan efektif hanya dapat mendorong pemegang saham pengendali untuk meningkatkan nilai ETR perusahaan. Secara marjinal, penelitian ini memberikan bukti bahwa efektifitas komite audit memperlemah hubungan antara efek *entrenchment* pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan yang menunjukkan peningkatan nilai ETR perusahaan. Berbeda untuk mekanisme pengendalian eksternal tata kelola perusahaan, kualitas audit eksternal yang laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 memperkuat hubungan antara efek *entrenchment* pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Kemungkinan fenomena ini terjadi diduga karena adanya kesempatan pemegang saham pengendali untuk melakukan penghematan pajak yang tidak melanggar hukum dan menutupi tindakan tersebut dengan menggunakan auditor dari KAP Big 4 untuk meyakinkan pemegang saham nonpengendali bahwa kepentingan mereka akan dilindungi.

5.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini ialah kepemilikan perusahaan asing sebagai pemegang saham pengendali tidak dapat ditelusuri sampai kepemilikan individu yang mungkin juga masih terafiliasi dengan pemegang saham pengendali dalam negeri. Dengan demikian, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menelusuri pemilik akhir dari perusahaan asing sebagai pemegang saham pengendali. Selain itu, pengukuran mekanisme tata kelola perusahaan berasal dari data sekunder pada laporan tahunan perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran mekanisme tata kelola perusahaan yang diperkuat dengan data primer juga. Selain itu, analisis perhitungan efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit dalam penelitian selanjutnya dapat diadakan verifikasi oleh orang lain dalam perhitungannya untuk meningkatkan objektivitas.

5.3. Implikasi Penelitian

Penelitian ini secara empiris menunjukkan mekanisme pengendalian eksternal tata kelola perusahaan belum berhasil melindungi kepentingan pemegang saham non-pengendali. Meskipun perusahaan telah melaksanakan mekanisme pengendalian internal tata kelola perusahaan dengan efektif, tetapi pengaruh yang ditimbulkan pada tindakan penghindaran pajak bisa jadi berbeda dalam

suatu perusahaan. Oleh karena itu, regulator perlu lebih memperhatikan praktik tata kelola perusahaan untuk dapat berfungsi secara efektif sebagai mekanisme kendali perusahaan, sehingga tindakan penghindaran pajak perusahaan dapat diminimalkan supaya menambah kemakmuran perusahaan maupun negara. Selain itu, regulator juga diharapkan mengeluarkan regulasi kepada perusahaan publik untuk mengungkapkan struktur kepemilikan sampai pemegang saham pengendali akhir di dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini untuk memberikan informasi para investor mengenai pemegang saham pengendali perusahaan dan tetap berhati-hati dalam menginterpretasikan mekanisme tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan yang disajikan perusahaan sebagai pertimbangan sebelum memutuskan berinvestasi.

Daftar Pustaka

- Badertscher, B.A., Katz, S.P., & Rego, S.O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics* 56, 228-250.
- Baker, C. R., & Owsen, D. M. (2014). Increasing the role of auditing in corporate governance. *Critical Perspectives on Accounting* 13, 783-795.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L.H.P. (2000). The separation of ownership and control in East Asia corporation. *Journal of Financial Economics* 58, 81-112.
- Desai, M., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics* 79, 145-179.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Diyanty, V. (2012). Pengaruh kepemilikan pengendali akhir terhadap transaksi pihak berelasi dan kualitas laba. *Disertasi*, Fakultas Ekonomi Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia Depok.
- Effendi, M. A. (2009). *The power of good corporate governance: Teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Francis, J. R. (2004). What do we know about audit quality. *The British Accounting Review* 36, 345-368.
- Friese, A., Simon, L., & Mayer, S. (2008). *Taxation and corporate governance – the state of the art*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics* 50, 127-178.
- Haryono, S. (2005). Struktur kepemilikan dalam bingkai keagenan. *Jurnal Akuntansi & Bisnis* 5, 63-71.
- Hermawan, A.A. (2009). Pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan oleh keluarga dan peran monitoring bank terhadap kandungan informasi laba. *Disertasi*, Program Studi Ilmu Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). *Institutional ownership and tax aggressiveness*. www.ssrn.com. 2 Desember 2013.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *J. Account, Public Policy* 30, 50-70.
- La Porta, R., De Silanes, F.L., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. *The Journal Of Finance* 54, 471-517.
- Leon, D. A., & Meliala, A. (2009). *Mengintip kiprah konsultan pajak di Indonesia*. Jakarta: Murai Kencana.
- Lo, A.W.Y., Wong, R.M.K., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies. *American Accounting Association, JATA* 32, 1-26.

- McGuire, S.T., Wang, D., & Wilson, R.J. (2011). Dual class ownership and tax avoidance. *American Taxation Association Midyear Meeting: JATA Conference*.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy* 26, 689-704.
- Sanjaya, I.P.S. (2010). Efek entrenchment and alignment pada manajemen laba. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, 1-26.
- Sari, D.K. (2010). Karakteristik kepemilikan perusahaan, corporate governance, dan tindakan pajak agresif. *Tesis, Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Depok*.
- Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1997). A survey of corporate governance. *Journal of Finance* 52, 737-783.
- Siregar, B. (2007). Pengaruh pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol terhadap dividen. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-44.
- Siregar, B. (2009). Pengaruh aliran kas bebas terhadap nilai pemegang saham dengan set kesempatan investasi dan dividen sebagai variabel moderator. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* 20, 157-174.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2014). Incentives for corporate tax planning and reporting: Empirical evidence from Australia. *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 10, 1 – 15.

Lampiran

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian

Tahun	2010	2011	2012	2013	Total
Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berdasarkan IDX Statistics	133	139	138	141	551
Perusahaan tidak terdaftar di BEI selama observasi secara berturut-turut	(13)	(13)	(13)	(13)	(52)
Nilai ETR dan CETR lebih dari satu	(9)	(5)	(7)	(3)	(24)
Kepemilikan ASTINDO ⁴	(17)	(12)	(20)	(21)	(70)
Memiliki ekuitas negatif	(11)	(10)	(10)	(11)	(42)
Data tidak diperoleh untuk semua variabel penelitian selama periode observasi	(13)	(29)	(18)	(23)	(83)
Total observasi	70	70	70	70	280

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Min.	Median	Max.	Std. Dev.
ETR	280	0.25	0.00	0.25	0.996	0.14
CETR	280	0.22	0.00	0.24	0.94	0.14
WEDGE	280	0.03	0.00	0.00	0.40	0.08
FAMILY	280	0.46	0.00	0.00	1.00	0.50
EDK	280	0.68	0.41	0.69	0.94	0.10
EKA	280	0.71	0.36	0.73	0.94	0.11
KAE	280	0.44	0.00	0.00	1.00	0.50
ROA	280	0.14	-0.27	0.11	1.29	0.16
LEV	280	0.09	0.00	0.01	0.69	0.14
PPE	280	0.42	0.0005	0.40	1.18	0.23
MB	280	3.27	0.04	1.42	45.93	5.97

Keterangan Tabel:

ETR = *effective tax rate*; CETR = *current tax rate*; WEDGE = hak kendali dikurangi hak arus kas; FAMILY = *dummy* kepemilikan, bernilai 1 jika perusahaan dengan pemegang saham pengendali keluarga dan 0 jika sebaliknya; EDK = *dummy* efektifitas dewan komisaris, bernilai 1 jika skor indeks efektifitas dewan komisaris lebih sama dengan 34 dan 0 jika sebaliknya; EKA = *dummy* efektifitas komite audit, bernilai 1 jika skor indeks efektifitas komite audit lebih sama dengan 22 dan 0 jika sebaliknya; KAE = *dummy* kualitas audit eksternal, bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan 0 jika sebaliknya; ROA = *return on assets*; LEV = *leverage*; PPE = nilai *property, plant, dan equipment* perusahaan; MB = *market book to ratio*.

⁴ perusahaan yang kepemilikan saham pengendalinya tidak terkategori asing tapi Indonesia yang oleh Kim (2003) dalam Diyanty (2012) kemudian dinamakan ASTINDO.

Tabel 3. Hasil Regresi Model 1

Model 1							
Variabel	Ekspektasi	ETR			CETR		
		Koef	Prob		Koef	Prob	
C		0,248	0,000		0,237	0,000	
WEDGE	H1: -	0,374	0,003	***	0,187	0,000	***
ROA	+	0,043	0,146		0,075	0,001	***
LEV	-	0,093	0,000	***	0,140	0,002	***
PPE	-	-0,049	0,000	***	-0,114	0,028	**
MB	-	-0,006	0,000	***	-0,005	0,013	**
Adj. R-squared		0,041			0,049		
F-statistic		1288,16			64,50		
Prob. (F-statistic)		0,000			0,000		
*** signifikan pada level 1%; ** signifikan pada level 5%							

Keterangan Tabel:

ETR = *effective tax rate*; CETR = *current tax rate*; WEDGE = hak kendali dikurangi hak arus kas; FAMILY = *dummy* kepemilikan keluarga, bernilai 1 jika perusahaan dengan pemegang saham pengendali keluarga dan 0 jika sebaliknya; ROA = *return on assets*; LEV = *leverage*; PPE = nilai *property, plant, dan equipment* perusahaan; MB = *market book to ratio*.